



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN TARUB TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TARUB**

Jl. Raya Tangkil - Mindaka, Tarub Tegal, Jawa Tengah 52184
<http://tarub.tegalkab.go.id> email: kec-tarub@tegalkab.go.id

**GOOD
GOVERNANCE**

2018 2019 2020

RESULT

2021

GOOD

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen awal perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarub Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun 2022, rancangan prioritas dan sasaran serta program kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 akhirnya segala daya dan upaya tidaklah sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun tidaklah lupa kami harap kan dari pihak semua guna mewujudkan cita - cita serta visi dan misi Kabupaten Tegal.

Tarub, Juni 2021
CAMAT TARUB

Drs. AGUNG BUDI WALUYO, MM
Pembina TK I
NIP. 19710205 199201 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	
TAHUN 2021.....	7
2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah	17
2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	28
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C.29	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)	8
Tabel 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	14
Tabel 2.4	: Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2021	15
Tabel 2.5	: Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021 ...	16
Tabel 2.6	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	18
Tabel 2.7	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	26
Tabel 3.1	: Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022	27
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024	30
Tabel 3.3	: Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tarub Tahun 2022.....	33
Tabel 3.4	: Program ,Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Tarub Tahun 2022	36
Tabel 4.1	: Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Tegal	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan PD, memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai kerangka (*framework*) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* pembangunan.

Renja Kecamatan Tarub Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Tarub 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan rencana kerja pada tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Tarub Tahun 2022 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang indikator kinerja dan kelompok sasarannya menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju, dimana rancangan Renja ini selanjutnya dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Tarub Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Tarub Tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman

pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan RENJA Kecamatan Tarub Tahun 2022 adalah :

1. Untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024 dan pedoman kerja Kecamatan Tarub tahun 2022;
 - a. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program pemerintahan umum Kecamatan Tarub Kabupaten yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
 - b. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - d. Terwujudnya kelancaran mekanisme dan proses pertanggungjawaban Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan yang jelas dan terarah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Tarub Tahun Anggaran 2022;
3. Terwujudnya media komunikasi antar para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Kecamatan Tarub Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TARUB TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TARUB

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN TARUB TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Tarub, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2021, Kecamatan Tarub melaksanakan Lima (5) program dan 11 (Sebelas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tarub Tahun Anggaran 2021.

Dari Lima (5) program dan 11 (Sebelas) kegiatan tersebut sampai dengan triwulan III 2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 75,76%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Tegal

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan TW.III 2021	
		Target Capaian	Pagu Penetapan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.456.524.000	78,43%	1.104.697.185
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.638.000	53,66%	1.290.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja SKPD	5 buku	4.187.000	75,00%	
	Penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Profile Kec.	1 dokumen	24.451.000	50,00%	1.290.000
	Pameran investasi/Perc. Pembangunan	1 kegiatan			
	Penyusunan LKJIP	5 buku			
	Penyusunan Dokumen SPIP	5 buku			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.269.411.000	80,18%	1.017.792.203
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.249.711.000	80,40%	1.004.712.203
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan SKPD	12 bulan	19.700.000	66,40%	13.080.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan TW.III 2021
Administrasi Umum Perangkat Daerah		44.740.000	65% 18.727.850
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis 2.635.000	66,94% 1.764.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	15 jenis 9.900.000	66,19% 6.552.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan kantor	15 jenis 2.790.000	78,99% 2.203.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	11 bulan 6.685.000	59,89% 4.003.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	16000 lbr 3.605.000	67,80% 2.444.250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan/koran	12 bulan 2.640.000	53,03% 1.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah	210 kali 16.485.000	65,00% 360.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		63.245.000	67,90% 31.727.632
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	350 lembar 1.495.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 bulan 30.000.000	66,67% 8.782.632
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium petugas kebersihan dan Petugas Jaga malam	12 bulan 31.750.000	72,27% 22.945.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.490.000	80% 35.159.500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan TW.III 2021	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit mobil dan 10 unit motor	40.100.000	75,00%	25.517.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Gedung	10.390.000	100,00%	9.642.000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laptop; 1 Komputer; 2 Printer; 2 AC	-		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tarub		41.185.000	58,89%	3.840.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.031.000	66,67%	3.840.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rakor Bidang Pemerintahan (Rakor Penderasan PBB dan Rakor Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, rakor LKPJDes)	3 rakor	20.031.000	66,7%	3.840.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			15.897.000		-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rakor bidang Yanum (Pendataan sarana prasarana infrastruktur, Sanitasi dan Persampahan	3 rakor	15.897.000	75,0%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.257.000		-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan (Penertiban Perijinan)	1 kegiatan	5.257.000	100,0%	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			166.227.000	31,35%	21.807.400
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			166.227.000	31,35%	21.807.400

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan TW.III 2021	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	17.985.000	100,0%	15.807.400
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tilik Desa	1 kegiatan	148.242.000	15,00%	6.000.000
	Hari Jadi Kabupaten Tegal	1 Kegiatan			
	Pelatihan/Lomba Gamelan	1 Kegiatan			
	Penyelenggaraan MTQ	1 kegiatan			
	Penyelenggaraan FASI	1 kegiatan			
	Pembinaan PKK	20 Desa			
	Pembinaan Kepemudaan	1 kegiatan			
	Rakor Bidang Kesra	6 Rakor			
	Rakor Bidang Pemberdayaan Desa	3 Rakor			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			53.265.000	89,94%	27.193.450
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			53.265.000	89,94%	27.193.450
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan HUT RI	1 kegiatan	31.833.000	100,0%	13.193.450
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Forkopimcam	12 bulan	21.432.000	65,3%	14.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30.193.000	80,52%	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30.193.000	80,52%	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan TW.III 2021	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Lomba Desa	20 desa	5.883.000		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan Lembaga Desa BPD	20 Desa	7.751.000	100,0%	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Linmas	1 kegiatan	16.559.000	100,0%	
	Rakor Keamanan Lingkungan	kegiatan	-		
			1.747.394.000	75,76%	1.157.538.035

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Tarub Triwulan III Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, karena faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Refocussing anggaran untuk mempercepat penanganan Covid19;
 - b. Efisiensi anggaran berupa sisa dari beberapa rekening belanja.
2. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatankapasitas SDM dan Kelembagaan;
 - b. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal;
 - c. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan; dan
 - d. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Tarub dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Tarub disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal**

No	Uraian	Satuan	Nilai awal tahun kinerja	Target renstra 2021	Realisasi 2021 (sementara)	Nilai Awal Tahun RPJMD / Renstra
1	IKM Kecamatan Tarub	%/Tahun	80.55	81.8		80.55
2	Persentase Desa Maju Kecamatan Tarub	%/Tahun	20	20	20	20
3	Persentase desa Mandiri Kecamatan Tarub	%/Tahun	0	0	0	0
4	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%/Tahun	100	100	100	100
5	Persentase Terselenggaranya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	%/Tahun	100	100	65	100
6	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%/Tahun	50	50		50

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Tarub Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.3 diatas, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Tarub yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Peningkatan Persentase desa mandiri IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Belum optimalnya koordinasi pamong desa dan BPD;
 - b) Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan reealisasi kegiatan; dan
 - c) Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait.
2. IKU Kecamatan Tarub yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 - b. Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi; dan
 - c. Peningkatan Persentase desa mandiri.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes;
3. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan;

4. Ada review RPJM sesuai dengan RKP.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Tarub Tahun 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan;
2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes; dan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Tarub merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2021,

Kecamatan Tarub menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.	Tidak semua pegawai memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/internet.
Masih kurangnya koordinasi dan keefektifan penyelenggaraan kegiatan.	Kurang mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
Pesatnya perkembangan pembangunan.	Mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan-bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.
Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah.	Terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu, selama Tahun 2021 Kecamatan Tarub juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.	SDM Aparatur Kecamatan dan Desa belum Profesional.
Adanya wilayah kerja yang strategis.	Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan.
Kondisi Geografis.	Pandangan negatif terhadap pelayanan KTP dan KK.
Pertanian, Peternakan/Perikanan.	Kurangnya koordinasi antar Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan.
Perdagangan, Industri/Kerajinan.	Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.
Pendidikan dan Program Nasional Keluarga Berencana.	Lemahnya organisasi pemuda.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tarub pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal;
2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin; dan
3. Persiapan musrenbang kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari desa.

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada Kecamatan Tarub adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan dikarenakan Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa,

Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa, dan Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Masih tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Tarub dan mindset masyarakat sangatlah mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta. Hal ini merupakan peluang bagi kecamatan agar mereka ikut berperan dalam Pronangkis.

2. Bidang Pemerintahan Desa

Pembangunan desa belum tertib administrasi, berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan Publik

Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Tarub untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal dan Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tarub Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

Rancangan Awal Renja Tahun 2022					Rencana Akhir Tahun 2022					Lokasi
Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (ribuan)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (ribuan)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	83,05	40.184.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	83,05	34.499.500	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan	100	20.030.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan	100	21.000.500	
<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan survey IKM terlaksanakan</i>	<i>keg</i>	<i>4</i>	<i>20.030.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan survey IKM terlaksanakan</i>	<i>keg</i>	<i>4</i>	<i>21.000.500</i>	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				14.897.000						
<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				<i>14.897.000</i>						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Persen; Tahunan	100	5.257.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Persen; Tahunan	100	13.499.000	
<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan</i>	<i>Jumlah desa lunas PBB</i>	<i>desa</i>	<i>20</i>	<i>5.257.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan</i>	<i>Jumlah desa lunas PBB</i>	<i>desa</i>	<i>20</i>	<i>13.499.000</i>	

<i>Lain yang Dilimpahkan</i>					<i>Lain yang Dilimpahkan</i>					
	<i>Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur</i>	<i>dok</i>	<i>100</i>			<i>Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur</i>	<i>dok</i>	<i>100</i>		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100	100		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100	100	10.715.050	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanganan Trantibum	desa/kel	20		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanganan Trantibum	desa/kel	20	10.715.050	
<i>Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor mitasi bencana</i>	<i>kali</i>	<i>2</i>		<i>Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor mitasi bencana</i>	<i>kali</i>	<i>2</i>	<i>10.715.050</i>	
	<i>Jumlah rakor siskamling</i>	<i>kali</i>	<i>2</i>			<i>Jumlah rakor siskamling</i>	<i>kali</i>	<i>2</i>		
	<i>Jumlah LINMAS dibina</i>	<i>orang</i>	<i>40</i>			<i>Jumlah LINMAS dibina</i>	<i>orang</i>	<i>40</i>		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	68	27.193.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	68	23.509.190	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa tertentu	desa	20	27.193.000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa tertentu	desa	20	23.509.190	
<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>desa</i>	<i>20</i>	<i>4.883.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>desa</i>	<i>20</i>	<i>6.376.300</i>	
<i>Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>			<i>20</i>		<i>Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>		<i>20</i>	<i>5.000.000</i>	

<i>dan Pdayagunaan Aset Desa</i>					<i>dan Pdayagunaan Aset Desa</i>					
<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Perangkat Desa dan anggota BPD dibina</i>	orang	40		<i>Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Perangkat Desa dan anggota BPD dibina</i>	orang	40	8.526.100	
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>				6.751.000						
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi</i>				<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi</i>				
<i>Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah perangkat desa terisi</i>				<i>Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah perangkat desa terisi</i>				
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun</i>	Dokuemn Desa	3 Dok / Desa		<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun</i>	Dokuemn Desa	3 Dok / Desa	3.606.790	
<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan</i>				<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan</i>				
<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				15.559.000						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	0	109.485.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	0	93.119.600	
	Persentase desa maju Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	20			Persentase desa maju Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	15		
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	desa	20	109.485.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	desa	20	93.119.600	

<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dan Desa</i>	<i>orang</i>	<i>100</i>	<i>17.985.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dan Desa</i>	<i>orang</i>	<i>100</i>	<i>18.165.000</i>	
	<i>Jumlah pelaksanaan pameran musrenbang</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah pelaksanaan pameran musrenbang</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>		
<i>Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat</i>	<i>kali</i>			<i>Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat</i>	<i>kali</i>			
	<i>Jumlah peserta pelatihan</i>	<i>orang</i>				<i>Jumlah peserta pelatihan</i>	<i>orang</i>			
<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi kemiskinan tingkat kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>4</i>	<i>91.500.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi kemiskinan tingkat kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>4</i>	<i>74.954.600</i>	
	<i>Jumlah koordinasi bunda paud</i>	<i>kali</i>	<i>2</i>			<i>Jumlah koordinasi bunda paud</i>	<i>kali</i>	<i>2</i>		
	<i>Jumlah koordinasi TP PKK tingkat kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>12</i>			<i>Jumlah koordinasi TP PKK tingkat kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>12</i>		
	<i>Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan</i>	<i>orang</i>	<i>40</i>			<i>Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan</i>	<i>orang</i>	<i>40</i>		
	<i>Kegiatan Yaumi</i>	<i>Keg</i>				<i>Kegiatan Yaumi</i>	<i>Keg</i>			
	<i>Kegiatan Posyandu</i>	<i>Keg</i>				<i>Kegiatan Posyandu</i>	<i>Keg</i>			
	<i>Kegiatan Pesta Siaga</i>	<i>Keg</i>				<i>Kegiatan Pesta Siaga</i>	<i>Keg</i>			
	<i>Jumlah kegiatan festival budaya</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah kegiatan festival budaya</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>		
	<i>Kegiatan PKBM</i>	<i>keg</i>				<i>Kegiatan PKBM</i>	<i>keg</i>			
	<i>Jumlah organsasi kepemudaan dibina</i>	<i>organisasi</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah organsasi kepemudaan dibina</i>	<i>organisasi</i>	<i>1</i>		
	<i>Jumlah kegiatan MTQ</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah kegiatan MTQ</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>		

	<i>Jumlah kegiatan FASI</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>			<i>Jumlah kegiatan FASI</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	100	53.265.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	100	68.126.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	53.265.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	68.126.000	
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>Keg</i>	<i>2</i>	<i>31.833.000</i>	<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>Keg</i>	<i>2</i>	<i>37.176.000</i>	
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>keg</i>			<i>Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>keg</i>			
<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>12</i>	<i>21.432.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>12</i>	<i>30.950.000</i>	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	285.123.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	1.842.951.660	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	dok	6	28.638.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	dok	6	17.462.210	
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>		<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>	<i>4.200.000</i>	
<i>Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>		<i>Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>	<i>13.262.210</i>	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	dok	12	31.280.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	dok	12	1.380.291.000	
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>tahun</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>tahun</i>	<i>1</i>	<i>1.342.671.000</i>	
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>31.280.000</i>	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>37.620.000</i>	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	40.485.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	58.039.850	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah jenis penerangan bangunan kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>15</i>	<i>2.635.000</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah jenis penerangan bangunan kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>15</i>	<i>2.478.000</i>	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>26</i>	<i>9.645.000</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>26</i>	<i>11.572.500</i>	
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia</i>	<i>jenis</i>	<i>15</i>	<i>2.790.000</i>	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia</i>	<i>jenis</i>	<i>15</i>	<i>3.142.600</i>	
<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	<i>Jumlah bulan pegawai, tamu</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>6.685.000</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	<i>Jumlah bulan pegawai, tamu</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>6.684.000</i>	

<i>Kantor</i>	<i>dan peserta rapat mendapatkan jamuan</i>				<i>Kantor</i>	<i>dan peserta rapat mendapatkan jamuan</i>				
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetakan</i>	<i>jenis</i>	<i>2</i>	<i>3.605.000</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetakan</i>	<i>jenis</i>	<i>2</i>	<i>3.580.750</i>	
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan</i>	<i>exemplar</i>	<i>143</i>	<i>2.640.000</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan</i>	<i>exemplar</i>	<i>143</i>	<i>2.640.000</i>	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>12.485.000</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>27.942.000</i>	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	Persen; Tahunan	100	62.800.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	Persen; Tahunan	100	255.463.000	
<i>Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah lemari arsip</i>	<i>buah</i>		<i>47.800.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah lemari arsip</i>	<i>buah</i>		<i>39.963.000</i>	
	<i>Jumlah meja kerja</i>	<i>buah</i>	<i>4</i>			<i>Jumlah meja kerja</i>	<i>buah</i>	<i>4</i>		
	<i>Jumlah kursi kerja</i>	<i>buah</i>	<i>4</i>			<i>Jumlah kursi kerja</i>	<i>buah</i>	<i>4</i>		
<i>Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah laptop</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>	<i>15.000.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah laptop</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>	<i>15.500.000</i>	
	<i>Jumlah printer</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah AC</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah sound system</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah mic wereless</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah blower satu</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah mesin potong rumput</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah dispenser</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah jam dinding</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>							
	<i>Jumlah korden</i>	<i>set</i>	<i>1</i>							
					<i>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>				<i>200.000.000</i>	

<i>Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainya tercukupi</i>	<i>unit</i>			<i>Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainya tercukupi</i>	<i>unit</i>		<i>200.000.000</i>	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			66.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			80.350.000	
<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Bulan</i>	<i>buah</i>	<i>12</i>	<i>2.100.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Bulan</i>	<i>buah</i>	<i>12</i>	<i>750.000</i>	
<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>36.000.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>35.000.000</i>	
<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah tenaga jasa kantor</i>	<i>orang</i>	<i>2</i>	<i>28.820.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah tenaga jasa kantor</i>	<i>orang</i>	<i>2</i>	<i>44.600.000</i>	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik			55.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik			51.345.600	
<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara</i>	<i>unit</i>	<i>1 unit mobil dinas, 7 unit motor</i>	<i>44.000.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara</i>	<i>unit</i>	<i>1 unit mobil dinas, 7 unit motor</i>	<i>46.040.000</i>	
<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebelair</i>	<i>Jumlah pemeliharaan mebelair</i>	<i>unit</i>			<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebelair</i>	<i>Jumlah pemeliharaan mebelair</i>	<i>unit</i>			
<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan kantor dan mesin lainya terpelihara</i>	<i>unit</i>	<i>1 Paket</i>	<i>3.500.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan kantor dan mesin lainya terpelihara</i>	<i>unit</i>	<i>1 Paket</i>	<i>3.785.600</i>	
<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya terpelihara</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>	<i>7.500.000</i>	<i>Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya terpelihara</i>	<i>unit</i>	<i>1</i>	<i>1.520.000</i>	
				515.250.000					2.072.921.000	

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tarub merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat RW. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk
- urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD propinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas	
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.
	PP 2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
	PP 3	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
	PP 4	Pengentasan Kemiskinan.
	PP 5	Pengentasan Kemiskinan.
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1	Perluasan Infrastruktur Dasar.
	PP 2	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana.
	PP 3	Peningkatan Konektivitas Multimoda Dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.
	PP 4	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan.
	PP 5	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM.
	PP 2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil.
	PP 3	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja.
	PP 4	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
	PP 5	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT.
	PP 2	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
	PP 3	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

		Aksesibilitas Air.
	PP 4	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan.
	PP 5	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.	PP 1	Penguatan Kemampuan Pertahanan.
	PP 2	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
	PP 3	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi.
	PP 4	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas.
	PP 5	Peningkatan Keamanan Siber.

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2021 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public.
4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah.
5. Peningkatan daya saing ekonomi local, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif.
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata.

Sesuai dengan Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 terdapat prioritas anggaran yang diperuntukan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai berikut :

1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah;
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;

5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah "Penguatan Dan Transformasi Sosial - Ekonomi Dan Pemerataan Insfrastruktur Yang Didukung SDM Pemerintahan Yang Profesional" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK;
2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi;
4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru;
5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender;
6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin;
7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020 REALISASI	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	
I	MISI I : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat.								
1.	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan.		Indeks Reformasi Birokrasi.	Angka; Tahunan	63,69	64,69	65,19	65,69	65,69
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	78,61	82,15	84,83	86,2	86,2
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6
1.2		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahun	63,61	67,61	70,61	73,61	73,61
1.3		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.4		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	72,12	76,42	78,31	80,56	80,56
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan								
2.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	72,31	77,26	79,68	81,36	81,36
2.1		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap		72,88	78,80	81,66	83,59	83,59
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.	Persen; Tahunan	74,88	76,93	78,02	79,15	79,15
2.2		Meningkatnya Sistem Jaringan /Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,20	75,30	75,40	75,50	75,50

2.3		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83
III	MISI III: Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.								
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata.		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	-1,46	3,5	4,2	4,9	4,9
3.1		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23
3.2		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	-0,46	1,56	2,74	3,78	3,78
3.3		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,85	1,99	2,23	2,33	2,33
3.4		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	-4,20	2,75	3,23	4,56	4,56
IV	MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
4.	Muwujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka; Tahunan	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	87,03	87,12	87,21	87,21
4.1		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,546	0,556	0,558	0,560	0,560
4.2		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,794	0,801	0,802	0,804	0,804
4.3		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,3	70,16	70,8	71,4	71,4
4.4		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	100	300	400	500	500
5.	Menekan Laju Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,14	8,21	8,11	8,05	8,05
5.1		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Jumlah; Tahunan	1,08	0,98	0,82	0,78	0,78

			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,19	0,15	0,12	0,10	0,10
5.2		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	9,82	9,53	9,24	8,45	8,45
V	MISI V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal								
6.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	80,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6.1		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persen; Tahunan	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
7.	Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	183,00	174,62	172,12	171,84	171,84
7.1		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,60	0,8	0,89	0,9	0,9
8.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
8.1		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan	Indeks; Tahunan	57,50	65,50	70,50	75,50	75,50

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarub serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tarub Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renja
Kecamatan Tarub Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	83,05%
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan Persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	68%
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0
			Peningkatan persentase desa maju	Persen; Tahunan	20%

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 berpedoman pada RKPD dan Renstra Perubahan Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarub, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Tarub :
 - a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :
 - a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; dan
 - Sub. Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum :
 - a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional; dan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
 - a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; dan
 - Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah; dan
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c) Kegiatan Administrasi Umum:
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud; dan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 3.4
Program ,Kegiatan dan Subkegiatan
Kecamatan Tarub Tahun 2022

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (ribuan)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	83,05	34.499.500
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan	100	21.000.500
<i>Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan survey IKM terlaksanakan</i>	<i>keg</i>	<i>4</i>	<i>21.000.500</i>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Persen; Tahunan	100	13.499.000
<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah desa lunas PBB</i>	<i>desa</i>	<i>20</i>	<i>13.499.000</i>
	<i>Jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur</i>	<i>dok</i>	<i>100</i>	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100	100	10.715.050
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanganan Trantibum	desa/kel	20	10.715.050

Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rakor mitasi bencana	kali	2	10.715.050
	Jumlah rakor siskampling	kali	2	
	Jumlah LINMAS dibina	orang	40	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	68	23.509.190
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa/tertentu	desa	20	23.509.190
Sub. Kegiatan Fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa	20	6.376.300
Sub Kegiatan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		20	5.000.000
Sub. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan anggota BPD dibina	orang	40	8.526.100
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi			
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Dokumen Desa	3 Dok / Desa	3.606.790
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	0	93.119.600
	Persentase desa maju Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	15	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	desa	20	93.119.600
Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD dan Desa	orang	100	18.165.000
	Jumlah pelaksanaan pameran musrenbang	keg	1	
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat	kali		
	Jumlah peserta pelatihan	orang		
Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi kemiskinan tingkat kecamatan	kali	4	74.954.600
	Jumlah koordinasi bunda paud	kali	2	
	Jumlah koordinasi TP PKK tingkat kecamatan	kali	12	
	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan	orang	40	
	Kegiatan Yaumi	Keg		
	Kegiatan Posyandu	Keg		

	<i>Kegiatan Pesta Siaga</i>	<i>Keg</i>		
	<i>Jumlah kegiatan festival budaya</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>	
	<i>Kegiatan PKBM</i>	<i>keg</i>		
	<i>Jumlah organsasi kepemudaan dibina</i>	<i>organisasi</i>	<i>1</i>	
	<i>Jumlah kegiatan MTQ</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>	
	<i>Jumlah kegiatan FASI</i>	<i>keg</i>	<i>1</i>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	100	68.126.000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	68.126.000
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>Keg</i>	<i>2</i>	<i>37.176.000</i>
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>keg</i>		
<i>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan</i>	<i>kali</i>	<i>12</i>	<i>30.950.000</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	1.842.951.660
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	dok	6	17.462.210
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>	<i>4.200.000</i>
<i>Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja</i>	<i>dok</i>	<i>3</i>	<i>13.262.210</i>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	dok	12	1.380.291.000
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>tahun</i>	<i>1</i>	<i>1.342.671.000</i>
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>37.620.000</i>
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	58.039.850
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah jenis penerangan bangunan kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>15</i>	<i>2.478.000</i>
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>26</i>	<i>11.572.500</i>
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia</i>	<i>jenis</i>	<i>15</i>	<i>3.142.600</i>
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>6.684.000</i>
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah jenis barang cetakan</i>	<i>jenis</i>	<i>2</i>	<i>3.580.750</i>

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	exemplar	143	2.640.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	bulan	12	27.942.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	Persen; Tahunan	100	255.463.000
Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah lemari arsip	buah		39.963.000
	Jumlah meja kerja	buah	4	
	Jumlah kursi kerja	buah	4	
Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop	unit	1	15.500.000
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000
Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainya tercukupi	unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			80.350.000
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	buah	12	750.000
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	bulan	12	35.000.000
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kantor	orang	2	44.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik			51.345.600
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara	unit	1 unit mobil dinas, 7 unit motor	46.040.000
Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebelair	Jumlah pemeliharaan mebelair	unit		
Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainya terpelihara	unit	1 Paket	3.785.600
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya terpelihara	unit	1	1.520.000
				2.072.921.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarub Tahun 2022, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berjumlah **6 (enam) program, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.072.921.000 (Dua Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah).** Rumusan Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Tegal

OPD : Kecamatan Tarub

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Rancangan Akhir Renja Tahun 2022						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		OPD Penang gung Jawab
					Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu	
									Nasional	Daerah				
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub	100%		100%		1.842.951.660	Kab. Tegal, Kecamat an Tarub, Semua Desa	DAU	Memperk uat Stabilitas Polhuhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarak at	Kantor Kecamatan Tarub		1.680.968.500	
Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu					17.462.210							32.585.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, jumlah dok renja RB, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra				1 Tahun	4.200.000						1 Tahun	4.410.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok Laporan kinerja LKJIP, Lap Keu, LAKIP				1 Tahun	13.262.210					1 Tahun	28.175.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.380.291.000						1.376.391.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1.342.671.000					1 Tahun	1.342.671.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan				1 Tahun	37.620.000					1 Tahun	33.720.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					58.039.850						46.402.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kebutuhan alat listrik dan elektronik				6 Jenis	2.478.000					6 Jenis	2.875.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpebutuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor				20 Jenis	11.572.500					20 Jenis	11.091.750	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpebutuhnya kebutuhan peralatan rumah tangga				16 Jenis	3.142.600					16 Jenis	3.208.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan				12 Bulan	6.684.000					12 Bulan	7.687.750	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah amplop dinas, stopmap dinas banner tercetak dan dokumen yang terdandan				12 Bulan	3.580.750					12 Bulan	4.145.750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	tersedianya surat kabar dan majalah				12 Bulan	2.640.000					12 Bulan	3.036.000	

undangan													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya perjalanan dalam rangka kedinasan				12 Bulan	27.942.000						12 Bulan	14.357.750
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan BMD yang dibutuhkan					255.463.000							61.375.000
Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Meja/Kursi Pejabat Struktural				5 Unit	39.963.000						5 Unit	33.375.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor				1 Unit	15.500.000						1 Unit	28.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Gedung	200.000.000						1 Gedung	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan					80.350.000							98.715.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi				12 Bulan	750.000						12 Bulan	2.415.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya layanan listrik, telepon dan speedy				12 Bulan	35.000.000						12 Bulan	45.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	44.600.000						12 Bulan	51.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD					51.345.600							65.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif surat pajak				12 Bulan	46.040.000						12 Bulan	54.000.000

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan; jumlah liter BBM												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan memsin yang terpelihara			12 Bulan	3.785.600						12 Bulan	5.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya bangunan kerja gedung kantor			1 Gedung	1.520.000						1 Gedung	6.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	85,05%	83,05%	83,05%	34.499.500	Kab. Tegal, Kecamatan Tarub, Semua Desa	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat Kecamatan Tarub		52.689.340	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan				21.000.500							33.090.860	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Tilik Desa)			12 Bulan	21.000.500						12 Bulan	33.090.860	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan				13.499.000							19.598.480	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	rakor PBB (penderasan) paten, IMB			12 Bulan	13.499.000						12 Bulan	19.598.480	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Maju Prosentase Desa Mandiri	25% 5%		15% 0%	20% 0%	93.119.600	Kab. Tegal, Kecamatan Tarub, Semua Desa	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat Kecamatan Tarub		205.640.880
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi, data perkembangan Desa					93.119.600							205.640.880
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang				1 Kegiatan	18.165.000						1 Kegiatan	49.458.750
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasi, Festival Budaya, MTQ, Rakor Kemiskinan				4 Kegiatan	74.954.600						4 Kegiatan	156.182.130
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		100%		10.715.050	Kab. Tegal, Kecamatan Tarub, Semua Desa	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat Kecamatan Tarub		11.236.390
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum					10.715.050							11.236.390
Sinergitas dengan	Jumlah Rakor mitigasi				3 Kegiatan	10.715.050						3	11.236.390

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19											Kegiatan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan	100%		100%		68.126.000	Kab. Tegal, Kecamatan Tarub, Semua Desa	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat Kecamatan Tarub		87.815.400	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						68.126.000							87.815.400	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	hari jadi Kab tegal dan HUT RI				2 Kegiatan	37.176.000						2 Kegiatan	63.168.600	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Kominikasi Pimpinan Kecamatan				12 Bulan	30.950.000						12 Bulan	24.646.800	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	100%		100%		23.509.190	Kab. Tegal, Kecamatan Tarub, Semua Desa	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat			59.010.475		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan					23.509.190							59.010.475		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Desa	6.376.300						20 Desa	16.178.250		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa				20 Desa	5.000.000						20 Desa	12.500.000		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina				20 Desa	8.526.100						20 Desa	21.315.250		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun				20 Desa	3.606.790						20 Desa	9.016.975		
TOTAL						2.072.921.000							TOTAL	2.097.360.985	

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Tarub, Oktober 2021
Camat Tarub

Drs. AGUNG BUDI WALUYO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710205 199201 1 001